

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang dengan modus pendirian perusahaan cangkang, dan hukum yang mengatur penyidik dan PPATK dalam mengungkap kasus tersebut.

Teknik penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan penelitian ini.

Money laundering atau pencucian uang menjadi kekhawatiran di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, karena dampaknya sangat berpengaruh bagi perekonomian dan stabilitas nasional. Para pelaku pencuci uang memiliki banyak cara mengenai bagaimana dan dimana mereka menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil kejahatannya menjadi terlihat bersih. Pencucian uang digolongkan sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Cara penyembunyiannya sangat beragam bergantung pada kondisi dan motivasi pelaku, dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Perusahaan cangkang merupakan media penyembunyian uang yang tidak biasa, karena konsep pendirian dan sifatnya yang tidak biasa juga. Perusahaan cangkang menyulitkan otoritas suatu negara termasuk Indonesia dalam mengidentifikasi pola transaksi yang ada di dalamnya karena banyak faktor yang menghambat. Sifat perusahaan cangkang yang berstatus sebagai dokumen rahasia menjadi media yang bisa diandalkan oleh para pelaku pencuci uang. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisis mengenai tindak pidana pencucian uang itu sendiri diatur di dalam hukum positif di Indonesia, serta bagaimana cara hukum di Indonesia memandang perusahaan cangkang sebagai modus untuk melakukan kejahatan pencucian uang.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Perusahaan Cangkang

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of the criminal law in the money laundering crime with the mode of establishment of a shell company, and laws that regulate investigators and PPATK in uncovering the case.

This research techniques uses a normative juridical approach. The type of data used in this research is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials that are relevant to this research.

Money laundering is a concern in various parts of the world including Indonesia, because the impact is very influential on the economy and national stability. Money launderers have many ways of how and where they hide or disguise the proceeds of crime to appear clean. Money laundering is classified as an extraordinary crime. How to hide varies greatly depending on the conditions and motivation of the perpetrator, and develops with advances in technology. The shell company is an unusual medium for hiding money, due to its conceptual establishment and unusual nature. Shell companies make it difficult for the authorities of a country including Indonesia to identify the transaction patterns that are in it because of many inhibiting factors. The nature of the shell company having the status of a secret document is the media that money launderers rely on. In this essay the author will analyse the money laundering crimes itself regulated in positive law in Indonesia, as well as how the law in Indonesia views shell companies as a mode to commit money laundering crimes.

Keywords: Money Laundering Crime, Shell Company.

